

Sinkronisasi Dunia Pendidikan dan Dunia Kerja: Analisis Keterserapan Alumni Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara

Muhammad Noor Shaleh¹, Ranti Suminar Endah²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Corresponding Author: Muhammad Noor Shaleh : noorshaleh534@gmail.com

Published: June, 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat keterserapan alumni Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dalam dunia kerja serta menganalisis tantangan hukum dan administrasi yang memengaruhi proses tersebut. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dan metode deskriptif-kualitatif, data diperoleh dari tracer study, wawancara, dan dokumen hukum terkait pendidikan tinggi. Hasil menunjukkan bahwa sebagian besar alumni berhasil terserap di dunia kerja, namun sebagian lainnya masih menghadapi waktu tunggu yang cukup panjang atau bekerja tidak sesuai bidang studi. Dalam perspektif hukum administrasi negara, fenomena ini mencerminkan masih lemahnya sinkronisasi antara regulasi pendidikan dan kebutuhan pasar kerja, serta terbatasnya intervensi negara dalam menjamin akuntabilitas perguruan tinggi, khususnya yang berbasis swasta. Tantangan utama yang diidentifikasi meliputi lemahnya akuntabilitas kelembagaan, tumpang tindih regulasi, keterbatasan kapasitas administratif internal kampus, dan minimnya perlindungan hukum terhadap alumni. Temuan ini menekankan pentingnya reformasi tata kelola hukum dan administrasi pendidikan tinggi guna meningkatkan keterhubungan antara pendidikan dan ketenagakerjaan secara lebih sistemik dan berkeadilan.

Kata Kunci: Keterserapan Alumni, Hukum Administrasi Negara, Perguruan Tinggi, Tracer Study, Dunia Kerja

ABSTRACT

This study aims to examine the level of absorption of alumni of Universitas Muhammadiyah Palangkaraya in the world of work and analyze the legal and administrative challenges that affect the process. Using a juridical-sociological approach and descriptive-qualitative method, data were obtained from a tracer study, interviews, and legal documents related to higher education. The results show that most alumni are successfully absorbed in the world of work, but some others still face a long waiting time or work not according to their field of study. From the perspective of state administrative law, this phenomenon reflects the weak synchronization between education regulations and the needs of the job market, as well as limited state intervention in ensuring the accountability of higher education institutions, especially those that are private-based. The main challenges identified include weak institutional accountability, overlapping regulations, limited internal administrative capacity, and lack of legal protection for alumni. The findings emphasize the importance of reforming the legal and administrative governance of higher education to improve the linkages between education and employment in a more systemic and equitable manner.

Keywords: Alumni Absorption, State Administration Law, Higher Education, Tracer Study, World of Work.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Menghadapi dunia kerja yang semakin dinamis dan kompetitif setiap calon lulusan perguruan tinggi dituntut untuk mampu menyesuaikan diri. Aktualisasi keilmuan dan kualitas lulusan pun menjadi pertimbangan besar bagi setiap lembaga penyedia lowongan pekerjaan untuk merekrut pegawainya. Pemahaman kualitas diri dan penyesuaian terhadap pasar kerja menjadi hal mutlak yang harus dimiliki institusi pendidikan tinggi. Keras dan cepatnya persaingan hanya dapat dimenangi dengan keunggulan

kompetensi baik secara komparatif maupun secara kompetitif. Secara komparatif keunggulan kompetensi sangat ditentukan oleh kualitas pembelajaran di perguruan tinggi, sedangkan keunggulan kompetensi yang bersifat kompetitif sangat terkait dengan kreativitas, inovasi dan kemampuan beradaptasi terhadap tuntutan-tuntutan dunia kerja yang terus berubah (Winarti, 2018).

Dalam peningkatan kualitas sumber daya lulusan dari seluruh perguruan tinggi menjadi perhatian bagi semua pihak dalam menghadapi Era Revolusi Industri saat ini. Dimana, masyarakat membutuhkan dukungan berbagai pihak untuk menghadapi persaingan bebas, sehingga pendidikan memegang peranan penting bagi peningkatan kualitas sumber daya lulusan yang dimiliki. Agar tidak tertinggal dengan masyarakat dan bangsa di dunia, maka peningkatan pendidikan menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat dan bangsa. Peningkatan kualitas pendidikan akan memiliki makna bagi perbaikan kualitas Indonesia secara keseluruhan (Pramesti et al., 2024).

Namun, perubahan yang cepat dalam dunia kerja yang semakin berkembang sebagai akibat dari era globalisasi dunia kerja dan revolusi industri di bidang teknologi serta berbagai disiplin *science* lainnya menuntut antisipasi dan evaluasi terhadap kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Evaluasi juga penting dilakukan agar dunia pendidikan tinggi tidak terpisah dan berjarak dari dunia kerja yang riil yang ada di masyarakat. Beberapa pergeseran dalam hal kompetensi dunia kerja yang terjadi saat ini meliputi dinamika antara pendidikan tinggi dan dunia kerja (Fonna, 2019). Setiap perguruan tinggi dituntut untuk memberikan bukti empiris bahwa pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan berkembang sejalan dengan tuntutan dunia kerja. Perguruan tinggi sebagai salah satu wadah pendidikan nasional memiliki peranan penting dalam melahirkan generasi cerdas untuk membangun bangsa. Fungsi tersebut menuntut perguruan tinggi untuk mampu berperan dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan serta pemeliharaan, pembinaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian (Fonna, 2019).

Perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan yang berkualitas, memiliki kemampuan dan keterampilan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan terserap oleh dunia kerja. Berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab IX Standar Nasional Pendidikan pasal 35 ayat 1, "... kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati". Berdasarkan uraian diatas, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam menghasilkan SDM yang berkompetensi dibidangnya dalam arti memiliki kecakapan, keahlian, kemampuan dan pengetahuan. Dalam proses pendidikan dihasilkan produk berupa lulusan yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan peranan-peranannya untuk masa yang akan datang. Peranannya berhubungan dengan jabatan dan pekerjaan tertentu, tentunya berhubungan dengan kegiatan pembangunan di Masyarakat (Fonna, 2019).

Lebih lanjut, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UM Palangkaraya) sebagai salah satu perguruan tinggi terbesar di Kalimantan Tengah selalu berusaha meningkatkan kualitas pendidikan sesuai

dengan kelima prinsip diatas, salah satunya dengan upaya menciptakan lulusan yang berkualitas dan mampu bersaing di dunia kerja. Untuk menciptakan relevansi antara dunia pendidikan dan dunia kerja, Pusat Karir UM Palangkaraya telah melakukan riset *Tracer Study* (Penelusuran Alumni) terkait kebutuhan, kepentingan dan kepuasan terhadap alumni UM Palangkaraya sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang.

Dalam kerangka pembangunan nasional, keterkaitan antara output pendidikan tinggi dan kebutuhan dunia kerja menjadi bagian dari tanggung jawab negara dalam menyelenggarakan sistem pendidikan yang responsif, adaptif, dan akuntabel. Hal ini tidak hanya merupakan persoalan teknis penyelenggaraan pendidikan, tetapi juga menyangkut aspek hukum administrasi negara, khususnya dalam hal fungsi negara sebagai administrator publik dalam menjamin kualitas layanan Pendidikan (Irianto, 2012).

Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, perguruan tinggi, termasuk yang berbadan hukum swasta seperti Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, menjalankan fungsi publik yang berada dalam pengawasan dan regulasi negara. Negara melalui kementerian teknis (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi) memiliki mandat administratif untuk memastikan bahwa standar pendidikan nasional ditegakkan, serta mekanisme akreditasi, penjaminan mutu, hingga pelaporan *tracer study* dilakukan secara tertib dan terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas perguruan tinggi tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga administratif dan legal, sebagai bagian dari pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pendidikan tinggi (Amsah & Malau, 2024).

Dengan demikian, tingkat keterserapan alumni dalam dunia kerja menjadi indikator penting tidak hanya dalam menilai kualitas institusi pendidikan, tetapi juga sebagai bagian dari evaluasi atas kinerja administratif negara dalam menyelenggarakan dan mengawasi sistem pendidikan tinggi. Ketidaksesuaian antara output lulusan dengan kebutuhan dunia kerja dapat mencerminkan kegagalan dalam pelaksanaan fungsi-fungsi administrasi negara, baik dalam perencanaan, pengawasan, maupun pengambilan kebijakan strategis dalam bidang pendidikan dan ketenagakerjaan (Dawami, 2022).

Oleh karena itu, kajian mengenai keterserapan alumni Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dalam dunia kerja di era Revolusi Industri penting untuk dilakukan, tidak hanya sebagai evaluasi internal lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai bahan analisis dalam kerangka hukum administrasi negara mengenai peran negara dan tanggung jawabnya dalam menjamin keterpaduan antara pendidikan tinggi dan pembangunan sumber daya manusia nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, yaitu memadukan kajian hukum (normatif) dengan realitas sosial yang terjadi di lapangan (Huda, 2021). Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji keterkaitan antara regulasi pendidikan nasional dan pelaksanaannya oleh perguruan tinggi, khususnya Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, dalam menghasilkan lulusan yang terserap di dunia kerja. Jenis penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif, dengan tujuan menggambarkan sejauh mana alumni

UM Palangkaraya terserap dalam dunia kerja serta menelaah peran dan tanggung jawab negara dan institusi pendidikan dalam perspektif hukum administrasi negara. Sumber data diperoleh melalui data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan alumni, pengelola kampus, dan instansi ketenagakerjaan, serta penyebaran kuesioner *tracer study*. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, laporan tracer study, dan literatur terkait hukum administrasi negara dan kebijakan pendidikan tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Kelembagaan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Gagasan untuk mendirikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UM Palangkaraya) berawal dari hasil Muktamar Muhammadiyah ke 41 di Surakarta, yang ditindaklanjuti oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah dengan membentuk panitia pendirian UM Palangkaraya melalui surat keputusan No. A-2/18/SK-PWM/1986 tanggal 28 Agustus 1986 (Rosmilawati & Eurotama, 2023).

Pendirian UM Palangkaraya diresmikan oleh Gubernur Kalimantan Tengah dan dihadiri oleh Ketua Majelis Pendidikan Tinggi dan Penelitian Pengembangan Pusat Muhammadiyah, pada tanggal 1 Muharram 1408 H, bertepatan dengan 24 September 1987 M. Pada awal berdirinya, UM Palangkaraya memiliki 4 fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Pertanian dan Fakultas Agama Islam. Perkembangan selanjutnya berdiri Fakultas Teknik pada tahun 1988, Fakultas Kehutanan pada tahun 2000 dan Fakultas Ilmu Kesehatan pada tahun 2006. Pada tahun 2011, Fakultas Pertanian digabung dengan Fakultas Kehutanan dan menjadi Fakultas Pertanian dan Kehutanan.

UM Palangkaraya selalu berusaha melakukan pembaharuan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan outputnya, sebagaimana tertuang dalam visi, misi dan tujuan yang tercantum dalam Statuta UM Palangkaraya Tahun 2014. Visi UM Palangkaraya adalah Unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlandaskan Iman dan Taqwa serta Misi UM Palangkaraya menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah sesuai dengan konsep Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin*, menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang Islami, berkualitas, dan akuntabel, menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada riset unggulan dan kompetitif, menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada upaya penyelesaian masalah aktual masyarakat dalam kerangka falsafah huma betang dan NKRI, membangun sistem kelembagaan yang kuat dan mendukung catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah, dan mengembangkan kewirausahaan dalam berbagai bidang ilmu, teknologi, dan seni budaya.

Tingkat Keterserapan Alumni UM Palangkaraya di Dunia Kerja

Hasil ini menggambarkan keterserapan alumni UM Palangkaraya Angkatan 2017. Dalam hal ini, mendeskripsikan keadaan alumni meliputi dua hal, yaitu alumni yang belum bekerja dan alumni yang telah bekerja. Dari keseluruhan alumni UM Palangkaraya Angkatan 2017 yang di ketahui yaitu sebanyak 73%

yakni 499 orang. Dari jumlah 73% alumni yang diketahui, terdapat 82 orang alumni yang mulai mencari pekerjaan sebelum lulus, mencari pekerjaan setelah lulus kuliah sebanyak 207 orang alumni dan alumni yang tidak mencari pekerjaan sebanyak 217 orang. Berdasarkan data distribusi kategori maka di peroleh tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Profil alumni UM Palangkaraya angkatan 2017

Pilihan Jawaban	Jumlah	Persentase
Sebelum Lulus	82	16.43
Sesudah Lulus	207	41.48
Saya Tidak Mencari Kerja	217	43.49

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa 16% alumni yang mencari pekerjaan sebelum lulus, mencari pekerjaan setelah lulus 41%, dan 43% alumni yang tidak mencari pekerjaan. Jadi dapat disimpulkan alumni UM Palangkaraya Angkatan 2017 telah terserap dalam dunia kerja dilihat dari persentase diagram diatas dapat diketahui bahwa 16% alumni telah bekerja sebelum lulus kuliah.

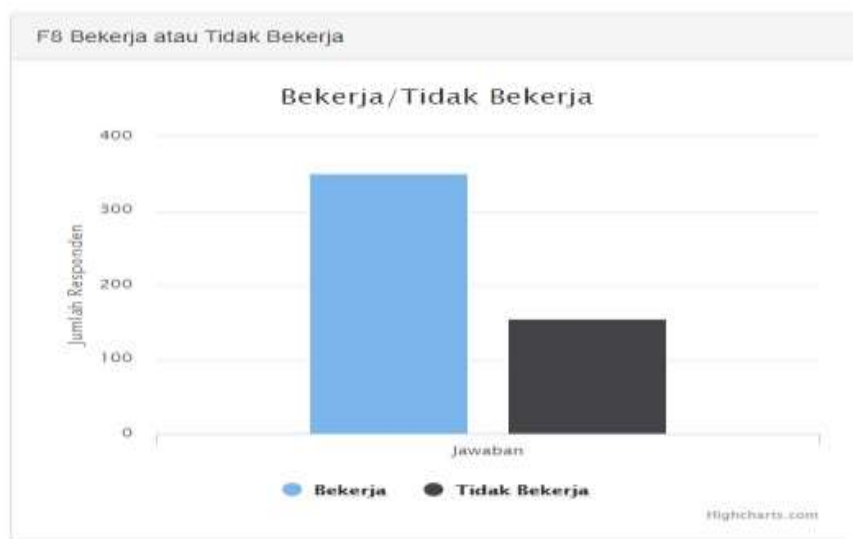
Lebih lanjut data yang peneliti peroleh, menunjukkan :



Grafik ini menginformasikan bahwa sebagian besar alumni UM Palangkaraya memperoleh pekerjaan setelah lulus (lebih dari 200 responden), sementara hanya sebagian kecil yang mendapatkan pekerjaan sebelum lulus (sekitar 70 responden).

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun mayoritas alumni berhasil memperoleh pekerjaan, waktu tunggu setelah kelulusan masih relatif signifikan. Ini dapat menjadi indikator perlunya perbaikan dalam sistem magang, tracer study, dan pusat karier di perguruan tinggi. Dalam perspektif hukum administrasi negara, hal ini berkaitan dengan tanggung jawab kelembagaan dalam menjalankan fungsi

pelayanan publik secara efisien, serta perlunya peran negara dalam mengarahkan regulasi dan pembinaan agar lulusan cepat terserap oleh pasar kerja.



Grafik ini menunjukkan bahwa sebagian besar alumni Universitas Muhammadiyah Palangkaraya telah berhasil memasuki dunia kerja. Dari total responden, sekitar 330 orang (sekitar 70%) menyatakan sudah bekerja, sementara sisanya, sekitar 140 orang (30%) masih belum bekerja.

Tingginya persentase alumni yang telah bekerja menunjukkan efektivitas proses pembelajaran dan peran lembaga pendidikan dalam menyiapkan lulusan untuk dunia kerja. Namun, data ini juga menggarisbawahi perlunya evaluasi sistem administrasi perguruan tinggi terhadap kelompok yang belum bekerja. Dalam konteks akuntabilitas administratif, ini menjadi bahan pertimbangan bagi negara (melalui Dirjen Diktiristek dan LLDIKTI) untuk memperkuat sistem pengawasan mutu dan mendorong kampus dalam meningkatkan *link and match*.



Grafik menunjukkan bahwa mayoritas alumni Universitas Muhammadiyah Palangkaraya merasakan keterkaitan yang cukup signifikan antara bidang studi yang ditempuh dengan pekerjaan yang saat ini mereka jalani. Sebanyak 57,2% responden menyatakan hubungan tersebut erat, dan 21,1% bahkan

menilainya sangat erat. Sementara itu, hanya sebagian kecil yang menilai hubungannya *cukup erat* (12,7%), *kurang erat* (6,9%), dan *tidak sama sekali* (2%).

Data ini menunjukkan adanya relevansi yang kuat antara kurikulum pendidikan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja, yang menandakan bahwa institusi telah menjalankan fungsi administrasi akademiknya secara akuntabel. Dalam perspektif hukum administrasi negara, hal ini mencerminkan kepatuhan perguruan tinggi swasta terhadap standar kompetensi lulusan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU No. 20 Tahun 2003 serta tanggung jawab lembaga terhadap output pendidikan publik.

Tantangan Hukum dan Administrasi dalam Peningkatan Keterserapan Alumni

Pada dasarnya kebijakan publik kerap lahir dari proses negosiasi antara kepentingan politik, identitas sosial, dan struktur institusional (Ahmad et al., 2024). Dalam hal ini Peningkatan keterserapan alumni dalam dunia kerja tidak hanya bergantung pada kualitas pendidikan yang diberikan oleh perguruan tinggi, tetapi juga pada tata kelola hukum dan administrasi yang mengatur hubungan antara negara, lembaga pendidikan tinggi, dan pasar kerja (Suti & Syahdi, 2020). Dalam konteks Universitas Muhammadiyah Palangkaraya sebagai bagian dari Perguruan Tinggi Swasta (PTS), terdapat sejumlah tantangan hukum dan administrasi yang perlu dikaji lebih mendalam.

1. Kelembagaan Perguruan Tinggi dan Akuntabilitas Pendidikan

Dalam perspektif hukum administrasi negara, perguruan tinggi adalah bagian dari subjek hukum publik yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada Masyarakat (Asyikin, 2020). Meskipun berstatus swasta, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tetap berada di bawah pengawasan negara melalui regulasi dan akreditasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Tantangannya adalah memastikan bahwa akuntabilitas internal kampus terhadap output lulusan (dalam bentuk keterserapan kerja) sejalan dengan akuntabilitas eksternal terhadap regulasi pemerintah. Ketiadaan sistem sanksi yang efektif terhadap PTS yang menghasilkan lulusan tidak terserap pasar kerja, menunjukkan lemahnya pendekatan hukum administratif dalam bidang pendidikan tinggi. Dalam konteks ini, penguatan mekanisme evaluasi, pelaporan tracer study, dan pelibatan lembaga audit eksternal menjadi penting sebagai instrumen pengawasan administratif.

2. Tumpang Tindih Regulasi dan Kurangnya Intervensi Negara

Salah satu tantangan utama adalah tumpang tindih atau belum sinkronnya regulasi nasional terkait pendidikan tinggi dan ketenagakerjaan. Perguruan tinggi seringkali diarahkan untuk mengejar akreditasi administratif berbasis dokumen, tanpa intervensi negara yang kuat dalam *link and match* antara kurikulum dan kebutuhan dunia kerja (Abdussamad, 2020). Hal ini menyebabkan lulusan cenderung mengalami waktu tunggu kerja yang lama atau bekerja di luar bidang studinya, sebagaimana terlihat dalam data bahwa sebagian besar alumni bekerja setelah lulus dan tidak semua sesuai dengan bidang studi. Dalam konteks ini, peran negara sebagai pengatur (regulator) dan pembina (facilitator) dalam hukum administrasi belum berjalan optimal. Perlu ada reformulasi kebijakan yang lebih kolaboratif antara negara, PTS, dan dunia

industri agar penyusunan kurikulum, magang, dan penempatan kerja tidak semata menjadi beban lembaga pendidikan, tetapi bagian dari state responsibility terhadap warga negaranya.

3. Kapasitas Administrasi Internal Kampus

Perguruan tinggi dituntut untuk memiliki administrasi internal yang adaptif dan responsif, baik dalam perencanaan kurikulum, penyelenggaraan tracer study, hingga sistem *Career Development Center* (CDC) (Utami et al., 2019). Namun, dalam praktiknya, banyak kampus swasta menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran dalam menjalankan fungsi-fungsi administratif tersebut. Tantangan ini menjadi signifikan dalam konteks hukum administrasi, karena kelalaian administratif dapat dikategorikan sebagai maladministrasi pelayanan publik. Oleh karena itu, penguatan kapasitas administratif kampus menjadi aspek hukum yang relevan, terutama dalam memastikan tata kelola pendidikan yang menjamin keterhubungan antara lulusan dan dunia kerja.

4. Minimnya Kepastian dan Perlindungan terhadap Alumni

Dalam sudut pandang hukum administrasi, alumni sebagai warga negara juga memiliki hak atas perlindungan dan kepastian hukum atas pelayanan pendidikan yang telah mereka terima. Jika perguruan tinggi gagal menjalankan fungsi pelayanan publiknya dengan baik, maka secara normatif negara wajib hadir memberikan pengawasan atau bahkan intervensi (Raharjo, 2022). Namun hingga kini, belum ada mekanisme klaim atau pemulihan hak yang jelas bagi alumni yang merasa tidak mendapatkan manfaat dari pendidikan tinggi secara proporsional, termasuk dalam hal keterserapan kerja.

KESIMPULAN

Peningkatan keterserapan alumni Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dalam dunia kerja merupakan cerminan dari efektivitas penyelenggaraan pendidikan tinggi dan tata kelola administrasi publik yang dijalankan oleh negara dan perguruan tinggi. Meskipun sebagian besar alumni telah bekerja, tantangan tetap muncul dalam bentuk lamanya waktu tunggu, ketidaksesuaian bidang kerja, serta lemahnya sistem pelacakan dan pendampingan karier.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, keberadaan perguruan tinggi, termasuk yang swasta, tetap berada dalam domain tanggung jawab publik yang diawasi oleh negara. Ketidaksesuaian antara output pendidikan dan kebutuhan kerja dapat dipahami sebagai bentuk kegagalan administratif—baik dari sisi perencanaan pendidikan, pelaksanaan pengawasan mutu, hingga perlindungan hukum terhadap alumni sebagai pengguna layanan publik. Empat tantangan utama yang teridentifikasi adalah: (1) lemahnya akuntabilitas kelembagaan perguruan tinggi terhadap lulusan, (2) tumpang tindih regulasi antara sektor pendidikan dan ketenagakerjaan, (3) keterbatasan kapasitas administrasi internal kampus, dan (4) minimnya jaminan dan perlindungan hukum bagi alumni. Oleh karena itu, reformasi sistem administrasi pendidikan tinggi diperlukan agar negara lebih aktif dalam membina dan mengarahkan lembaga pendidikan untuk mampu menjamin keterpaduan antara sistem pendidikan dan kebutuhan dunia kerja.

Hal ini harus diwujudkan melalui kebijakan yang partisipatif, berbasis data tracer study yang akurat, serta sistem pengawasan dan evaluasi yang berorientasi pada akuntabilitas sosial dan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2020). *Cakrawala Pelayanan Publik di Negara Dunia ke Tiga*.
- Ahmad, J., Wafi, M. H., & Wahdini, M. (2024). Diversity, Ethnic Politics, And Policy Formulation In Legislative Institutions: Keberagaman, Politik Etnis, Dan Formulasi Kebijakan Di Lembaga Legislatif. *Anterior Jurnal*, 23(2), 116–122.
- Amsah, L. R., & Malau, H. (2024). Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Tata Kelola Kebijakan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum Di Universitas Negeri Padang. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(2), 9.
- Asyikin, N. (2020). Pengawasan Publik terhadap Pejabat Publik yang Melakukan Tindakan Korupsi: Perspektif Hukum Administrasi. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), 80–102.
- Dawami, A. (2022). Pemberdayaan alumni terhadap peningkatan mutu sumber daya manusia di pesantren Al Binaa. *Idarab Tarbawiyah: Journal of Management in Islamic Education*, 3(2), 87–108.
- Fonna, N. (2019). *Pengembangan revolusi industri 4.0 dalam berbagai bidang*. Guepedia.
- Huda, M. C., & S HI, M. H. (2021). *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute.
- Irianto, S. (2012). *Otonomi perguruan tinggi: suatu keniscayaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Pramesti, K. D., Meisya, N. I., & Amrillah, R. (2024). Relevansi Lulusan Perguruan Tinggi dengan Dunia Kerja. *An Najah (Jurnal Pendidikan Islam Dan Sosial Keagamaan)*, 3(4), 236–243.
- Raharjo, M. M. (2022). *Manajemen Pelayanan Publik*. Bumi Aksara.
- Rosmilawati, S., & Eurotama, R. F. (2023). *Laporan Penelitian" Strategi Komunikasi Kebumasan dalam Membangun Citra di Universitas Muhammadiyah Palangka Raya"*.
- Suti, M., & Syahdi, M. Z. (2020). Tata Kelola Perguruan Tinggi dalam Era Teknologi Informasi dan Digitalisasi. *JEMMA (Journal of Economic, Management and Accounting)*, 3(2), 203–214.
- Utami, B. H. S., Gumanti, M., Pratiwi, R., & Susilowati, T. (2019). Tracer Study: Peta Dunia Kerja Alumni STMIK Pringsewu. *Proceeding Indonesian Carrier Center Network (ICCN) Summit 2019*, 1(1), 118–123.
- Winarti, E. (2018). Perencanaan manajemen sumber daya manusia lembaga pendidikan. *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Ilmiah*, 3(1), 1–26.